

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia pekerjaan atau pemerintahan sudah sering terjadi korupsi didalamnya, hal ini bertujuan untuk menjadi kepuasan sendiri dan mencari kekayaan atau harta secara instan lewat jabatannya pada pelaku yang melakukan tindak korupsi. Korupsi merupakan masalah utama di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, namun tampaknya sia-sia. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa. Muhammad Ali (1993 hlm, 214) korup artinya malas, rela menerima, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri, dan lain lain. Korupsi berarti perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, menerima suap dan lainnya dan koruptor artinya. Korupsi merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Korupsi telah terjadi sejak zaman Mesir Kuno dan praktik korupsi itu sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat, korupsi dapat merubah segalanya uang pemerintah yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat dipakai untuk kesenangan pelaku menjadikan pelaku tindak korupsi sangat harus dijera hukuman sebesar besarnya. Korupsi menjadi hal yang menakutkan di setiap negara, dampak yang diakibatkan korupsi sangatlah berdampak besar, menjadi sebuah kerugian bagi negara dan kerugian bagi pelaku, bahkan di beberapa negara pelaku tindak korupsi dihukum mati. Sekelas desa bisa jadi tidak luput dari korupsi, pemerintahan kecil yang memiliki sumber dana dari pemerintah jika salah penanganannya akan berpotensi terjadinya korupsi oleh pada pejabat desa itu sendiri, perlu adanya upaya pada perangkat desa sendiri untuk dapat mengantisipasi terjadinya korupsi sekalipun dalam skala kecil (Handayani, 2019)

Mentalitas birokrasi pemerintahan di Indonesia seperti yang kita semua ketahui bahwa korupsi merupakan bencana yang dapat mengerikan pemerintahan, penyakit yang acap kali menghinggapi pemimpin birokrasi ialah keinginan untuk selalu menambah jumlah organisasinya. Keinginan untuk menambah jumlah organisasi sudah baik, asalkan unit organisasi yang ada

(*the existing units*) dievaluasi, apakah pekerjaannya masih efektif atau tidak. Jika tidak berhasil, itu akan dibubarkan, digabung atau diganti dengan yang baru, atau jika masih efektif jangan dibentuk organisasi baru, peluang korupsi bisa saja muncul dengan adanya orang-orang baru baru dalam organisasi, terutama jika merekrut orang-orang terdekat, peluang korupsi bisa saja muncul dengan setiap pemikiran orang-orang dalam organisasi seperti kekeluargaan. Dibutuhkan sebuah program dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan program yang menekankan sikap disiplin untuk menekankan sikap anti korupsi, organisasi dapat menjadi sebuah kumpulan yang isinya bertujuan untuk korupsi, namun dengan diciptakannya program dalam sebuah organisasi khususnya dalam sebuah pemerintahan akan menjadi sebuah pedoman untuk anggota didalamnya agar menanamkan sikap anti korupsi

Perlu adanya program dalam sebuah instansi pemerintahan yang didalamnya menekankan untuk menjauhi korupsi, hal ini bertujuan untuk menggunakan kewenangan sebijak mungkin dan menjauhi apa yang akan merugikan orang banyak, korupsi sendiri bukan hanya merugikan diri sendiri melainkan akan merugikan orang disekitar terutama seorang pejabat, banyak rakyat yang berharap pada pemerintah untuk kesejahteraan namun banyak yang dikecewakan karena penyalahgunaan kekuasaan. Contoh kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di Indonesia adalah keluarga Cendana atau keluarga Soeharto. Diketahui, keluarga Cendana atau keluarga soeharto saat itu sedang melakukan KKN. kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Ini adalah program pinjaman Bank Indonesia untuk bank-bank Indonesia lainnya yang mengalami kesulitan likuiditas selama krisis ekonomi dan mata uang tahun 1998. Program ini sangat merugikan Indonesia. Biasanya, bank yang telah mengembalikan bantuan ke Bank Indonesia mendapatkan SKL (Sertifikat). dibayar). Ternyata SKL diterbitkan sebelum peminjam melunasi utangnya. Menurut keterangan KPK, Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 3,7 triliun.. Kemudian yaitu kasus E-KTP. Kasus ini cukup fenomenal pada tahun 2017, karena menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Ia telah melakukan tindak korupsi Bersama – sama yang artinya juga melakukan kolusi proyek E-KTP tahun anggaran 2011-2013 sebesar US\$7,3 juta dan telah

menerima satu jam tangan merek Richard Mille dengan harga US\$135 ribu. Pada pemerintahan tinggi sekalipun kasus nepotisme akan menjadi dampak buruk bagi sebuah negara, jika nepotisme terjadi dalam perangkat desa maka tindak korupsi akan semakin besar peluangnya, pemerintahan kecil di daerah makan akan terjadi banyak kesalahan didalamnya, menjadikan sebuah instansi keluarga menjadi tempat sarana untuk mendapatkan pekerjaan orang – orang terdekat, kasus nepotisme dalam sebuah pemerintahan bisa berakibat fatal karena memposisikan seseorang bukan pada tempat yang seharusnya. (Choirinnisa 2017)

Penyeleksian karyawan perusahaan atau perangkat pemerintahan seperti pegawai desa atau perangkat desa sebisa mungkin harus dilakukan seleksi secara selektif dan atas dasar kemampuan serta Pendidikan jika diperlukan, karena dengan menyeleksi dengan cara seperti itu maka kedepannya sebuah instansi atau perangkat pemerintahan akan berjalan dengan baik, dan diharapkan dengan melakukan penyeleksian bedasarkan kemampuan tanpa adanya nepotisme diharapkan dengan adanya orang – orang baru yang berada dipemerintahan atau orang orang baru yang akan memiliki jabatan akan jauh dengan tindak korupsi dan jauh dari nepotisme

Penanaman nilai karakter menjadi sebuah kebutuhan nilai bagi orang orang, terutama ditamankan sejak sekolah, Menurut Maxwell, Karakter sebenarnya jauh lebih baik daripada kata-kata belaka. Sebaliknya, karakter adalah pilihan yang dapat menentukan kesuksesan seseorang, Menurut Wyne, Karakter adalah tanda bagaimana suatu teknik atau cara memfokuskan penerapan nilai-nilai kebaikan pada tingkah laku atau tindakan. Menurut Doni Kusuma, Definisi karakter adalah gaya, kualitas, ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dihasilkan dari cetakan atau kesan yang mereka terima dari lingkungannya. Menurut T Ramli 2003, Pendidikan karakter memiliki hakikat dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang baik, warga negara dan warga negara yang baik. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah

pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri.

Pasal 603-606 KUHP memuat pengaturan tentang korupsi dalam KUHP yang baru. Menurut Pasal 603, misalnya, pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

Dari uraian diatas maka peneliti merasa penting untuk meneliti lebih jauh dan lebih dalam terkait permasalahan - permasalahan terkait sikap anti korupsi pada perangkat desa. Maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan judul **“Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa”**

## **B. Identifikasi masalah**

Pada era sekarang maraknya korupsi menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi setiap bangsa, angka kerugian yang dilakukan dengan tindak korupsi akan sangat besar. Perlu adanya program di desa untuk mencegah terjadinya korupsi dan selalu diperhatikan Ketika program tersebut berjalan, berdasarkan dasar negara kita Pancasila dan juga pedoman agama yang isinya mengutamakan bersikap jujur.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian perlu dibuat rumusan masalah terlebih dahulu untuk pertimbangan dengan maksud dan tujuan yang sedemikian jelas sehingga berorientasi pada tujuan dan mudah untuk mengidentifikasi metode mana yang cocok untuk memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa ?
2. Bagaimana Mengoptimalkan Program Peningkatan Kapasitas Perangkat untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa?

3. Bagaimana Dampak Program Peningkatan Kapasitas Perangkat untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh para peneliti di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Mengoptimalkan Program Peningkatan Kapasitas Perangkat untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa
3. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Program Peningkatan Kapasitas Perangkat untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis  
Penelitian yang telah ditulis ini diharapkan bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan dan mampu memberikan peningkatan dalam karya tulis serta dapat dijadikan sebagai subjek penelitian untuk dapat lebih mendalam dalam memahami program anti korupsi pada perangkat desa.
2. Bagi Perangkat Desa  
Riset ini diharapkan dapat dijadikan literatur sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam merancang kegiatan program-program anti korupsi pada perangkat desa dan Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi Perangkat Desa Langensari dalam rangka meningkatkan sikap anti korupsi untuk perangkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu Anti Korupsi untuk dapat diamalkan dan disebarkan dengan tujuan meningkatkan sikap anti korupsi untuk mencegah korupsi di Indonesia.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi subangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, khususnya menumbuhkan rasa anti korupsi pada setiap individu
  - c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk lebih menggali dasar dari nilai karakter PKN untuk menciptakan rasa nasionalisme, toleransi, logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri dan menjahui tindak korupsi.

#### **F. Definisi Oprasional**

Karena keterbatasan peneliti, masalah yang akan dipelajari dan ditangani sesuai dengan definisi berikut:

1. Impelementasi

Menurut Mulyadi (2015, hlm 12), “Implementasi berarti tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengubah keputusan ini menjadi pola tindakan dan menghasilkan perubahan yang lebih besar atau lebih kecil dengan cara yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya adalah tentang memahami apa yang harus terjadi setelah program dilaksanakan.”

2. Korupsi

Menurut Sam Santoso (2003, hlm 14) Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi adalah suatu bentuk penyimpangan yang disengaja dari tugas resmi untuk memperoleh status, keuangan atau keuntungan finansial bagi seseorang, keluarga dekat atau kelompoknya sendiri. Dikatakan bahwa harus membayar biaya untuk tempat ini, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelaku. Karena itu, ia merasa berhak melakukan korupsi setelah masa jabatannya.

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Menurut Budi Hasanah, Ahmad sururi. (2017, hlm 2) Dan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaporan keuangan desa diperlukan aparat pemerintah desa dan masyarakat yang cakap dan memiliki kemampuan. Berdasarkan hasil analisis situasi sosial ditemukan bahwa permasalahannya adalah rendahnya kemampuan SDM aparatur pemerintahan desa dalam menghadapi perumusan kebijakan desa dan pengelolaan pelayanan desa, serta kurangnya keterampilan dalam pengelolaan keuangan kota. yang mempersulit penyusunan rencana keuangan desa. Dalam hal ini, keberadaan pendamping desa sebagai fasilitator desa masih belum cukup mendukung terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan masyarakat.

### 4. Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi

Menurut Muchlas Samani & hariyanto, (2011, hlm 1). 17 Agustus 1945, Para Bapa Pendiri (*the founding fathers*) memahami bahwa paling tidak tiga tantangan besar harus diatasi terlebih dahulu: penciptaan bangsa yang bersatu dan berdaulat; kedua, pembangunan bangsa; yang ketiga membangun karakter. Ketiga tema ini terlihat jelas dalam konsep negara bangsa (*nation- state*) dan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Dalam pelaksanaannya, upaya pembentukan negara relatif lebih cepat dibandingkan dengan upaya pembentukan bangsa dan karakter. Terbukti bahwa kedua topik yang saling terkait ini harus disikapi secara terus menerus dan tidak terputus dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia.

### 5. Desa

Menurut N.Daldjoeni (2011, hlm 4) Desa menurut arti secara umum juga dapat dikatakan pemukiman manusia yang tata letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

## **G. Sistematika Skripsi**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian berisi tentang bagian awal bagian skripsi dan penjabaran sebuah permasalahan yang dikemukakan penulis serta disusun secara rapih serta sistematis, terdapat beberapa bagian subbab sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Definisi Oprasional
- G. Sistematika Skripsi

### **2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bagian ini berisi tentang kajian teori yang berdesarkan sumber yang jelas dikemukakan oleh para ahli sebagai penguatan teori dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa subbab sebagai berikut:

- A. Desa
  - 1. Perngertia Desa
  - 2. Peran Desa
  - 3. Pemerintahan Desa
  - 4. Perangkat Desa
- B. Program Desa
  - 1. Pengertian Program Desa
  - 2. Faktor Terbentuknya Program Desa
- C. Sikap Anti Korupsi
  - 1. Penertian Sikap Anti Korupsi
  - 2. Penguatan Sikap Anti Korupsi
- D. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat
- E. Penelitian Terdahulu
  - 1. Hasil Penelitian Terdahulu
  - 2. Persamaan Penelitian
  - 3. Perbedaan Penelitian

F. Kerangka Pemikiran

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi tentang metode penelitian secara sistematis yang akan dilakukan oleh peneliti, membuat perencanaan penelitian yang didasarkan dari para ahli yang membuat proses metode penelitian semakin terarah dan sistematis, terdapat beberapa subbab sebagai berikut:

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Kehadiran Peneliti
- C. Instrumen Penelitian
- D. Sampel Data dan Sumber Data
- E. Prosedur Pengumpulan Data
- F. Populasi dan Sampel
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini merupakan bagian penyampaian hasil penelitian secara sistematis dan juga terperinci dari hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, terdapat beberapa subbab sebagai berikut:

- A. Paparan Data
- B. Temuan Hasil Penelitian
  - 1. Deskripsi Hasil Observasi
  - 2. Deskripsi Hasil Wawancara
  - 3. Pembahasan Hasil Penelitian
- C. Pembahasan
  - 1. Pembahasan Hasil Penelitian
  - 2. Kerangka Hasil Penelitian
  - 3. Triangulasi Data Penelitian

### **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini merupakan bagian akhir sebuah penulisan yang menjadi titik acuan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan menjadi

hasil akhir pada penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa subbab sebagai berikut:

A. Simpulan

B. Saran